

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat baik secara lahir maupun batin.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang belum dikembangkan secara maksimal. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dibutuhkan dukungan dari semua sektor yang dapat dikembangkan sehingga dapat mendorong laju perekonomian daerah dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespon perubahan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Selain itu otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong agar pembangunan daerah lebih

kondusif yang akan memunculkan inovasi dari masyarakat untuk bersaing dengan negara lain. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki suatu daerah yang berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pembangunan daerah-daerah dapat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Disinilah peran pemerintah harus lebih aktif untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1997). Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda terutama perbedaan pada kondisi sumber daya alam yang berbeda pada setiap daerah, oleh karena itu setiap daerah harus memberikan ciri yang berbeda pada setiap pendapatan daerah. Kemampuan dari pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7^o33'-8^o12' Lintang selatan dan 110000'-110050' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km². Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

Tabel 1.1
Kondisi Geografis DIY

Kabupaten/kota	Luas area	kecamatan	Kelurahan/desa
Kota Yogyakarta	32,50 km ³	14 kecamatan	45 kelurahan
Kab. Bantul	506,85 km ³	17 kecamatan	75 desa
Kab. Kulonprogo	586,27 km ³	12 kecamatan	88 desa
Kab. Gunungkidul	1.485,36 km ³	18 kecamatan	144 desa
Kab. Sleman	574,82 km ³	17 kecamatan	86 desa
DIY	3.185,80 km ³	78 kecamatan	438 kelurahan/desa

Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2012

Letak Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat strategis dan banyak menyimpan kekayaan alam khususnya sektor swasta dapat menjadi kekuatan atau modal bagi daerah untuk mengembangkan sumber daya yang ada serta memaksimalkan sektor-sektor yang dapat mendorong terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal memiliki kekayaan potensi pesona alam dan budayanya yang sampai sekarang masih menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara. Hal lain yang menjadikan Yogyakarta mendapat sebutan sebagai Daerah Tujuan Wisata terkemuka karena disamping banyak dan ragamnya pesona Daya Tarik Wisata juga telah tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang

pariwisata seperti akomodasi, restoran/rumah makan, telekomunikasi, tempat hiburan, toko souvenir, dll.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Industri pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, hal ini dapat terlihat dari kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional dan daya serap lapangan kerja di sektor industri pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sub sektor Pariwisata di DIY tahun 2010-2012 menunjukkan pada tahun 2010 kontribusi Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata di Kota Yogyakarta sebesar 52,7%, Kabupaten Sleman sebesar 38,3%, Kabupaten Kulonprogo sebesar 1,68% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,9%, sehingga total sebesar 99,8% PAD di DIY berasal dari sektor pariwisata. Kenaikan terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,0% dan pada tahun 2012 sebesar 42,5% (Statistik Kepariwisata, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memegang peranan penting bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di DIY.

Dengan adanya pariwisata tentu akan mendatangkan berbagai dampak baik untuk nasional maupun daerah yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari segi ekonomi industri sektor pariwisata dapat berkontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar daerah obyek wisata. Dari segi dampak lingkungan apabila sektor pariwisata dikembangkan akan menyebabkan lingkungan dapat berkembang dan sumber daya

yang ada dapat dikelola dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari segi sosial pengembangan sektor pariwisata akan meningkatkan kerjasama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengembangkan obyek-obyek pariwisata guna mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Pengembangan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara karena sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Majunya industri pariwisata suatu daerah tergantung pada jumlah wisatawan baik lokal maupun asing yang datang, karena itu harus didukung dengan meningkatkan pemanfaatan daerah tujuan wisata serta sarana dan prasarana serta akomodasi yang dapat mendukung pemanfaatan daerah tujuan wisata sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Selain itu perlu diupayakan pengembangan obyek-obyek dan produk yang berkaitan dengan pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sebab pariwisata bisa dikatakan sebagai penggerak dari sektor- sektor lain seperti sektor industri dan jasa. Selama para

wisatawan menjalankan kegiatan berwisatanya ia akan melakukan kegiatan konsumtif sehingga secara langsung membutuhkan barang dan jasa. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20). Data investasi tercatat selama lima tahun terakhir dari tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY sebesar 5,69% yang terdiri dari kenaikan investasi PMDN sebesar 13,68% dan pertumbuhan investasi PMA sebesar 1,20%.

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah juga akan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan Asli Daerah, karena PDRB juga merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah. Berikut data yang menunjukkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari tabel di bawah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai PDRB yang tinggi dibandingkan dengan 3 kabupaten yang lain. Dari semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai PDRB dari kurun waktu tahun 2006-2010 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DIY Atas Dasar Harga Konstan
(Juta) 2006-2010

Kabupaten/ kota	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kulonprogo	1.524.848	1.587.630	1.662.370	1.728.304	1.781.227
Bantul	3.299.646	3.448.949	3.618.060	3.779.948	3.967.928
Gunungkidul	2.830.583	2.941.288	3.070.298	3.197.365	3.330.080
Sleman	5.309.059	5.553.580	5.838.246	6.099.557	6.373.200
Kota	4.574.051	4.776.401	5.021.149	5.244.851	5.505.942

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Perbedaan jumlah nilai PDRB yang diperoleh disetiap kabupaten/kota ini terjadi karena di kabupaten Sleman populasi manusianya selalu berkembang dan berakibat pada peningkatan PDRB. Selanjutnya dijelaskan perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di DIY selama kurun waktu 2008-2010.

Tabel 1.3
Perkembangan PAD di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2008-2010

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2008	42.286.238	69.800.762	32.907.615	140.631.359	132.431.572
2009	39.358.628	88.691.363	38.455.406	157.231.268	161.482.657
2010	44.416.717	90.238.880	39.756.345	147.072.535	178.761.030

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Perkembangan jumlah pendapatan Asli daerah di DIY dalam 3 tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, namun dari 5 Kabupaten di DIY dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman. Di kabupaten Kulonprogo penurunan tingkat Pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2009,

sedangkan di kabupaten Sleman penurunan tingkat pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara investasi, pendapatan sektor pariwisata, dan PDRB per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Pariwisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”***

A. Batasan Masalah Penelitian

Salah satu indikator untuk mengukur Pendapatan Asli daerah yang diperoleh suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita, dan investasi yang ada. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas terdapat beberapa keterbatasan yang akan dialami oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya:

1. Obyek yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah di Daerah istimewa Yogyakarta.
2. Pendapatan sektor pariwisata menjadi sektor penting dalam peningkatan PAD sehingga digunakan data jumlah wisatawan, dan jumlah obyek wisata dalam penelitian ini

3. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi sebagai variabel independent.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta dari berbagai obyek dan retribusi serta pajak akan diketahui. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan menjadi

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Seberapa besar pengaruh Investasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian penelitian ini di masa yang akan datang di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Sleman, Yogyakarta) dan di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan daerah dari beberapa sektor yang salah satunya adalah sektor pariwisata
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa jauh pengetahuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap materi yang sudah diajarkan.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian mereka.